



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL
NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR
SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu mengubah daftar instansi dan angka kode instansi pusat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

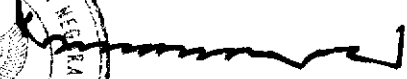
Mengubah Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.


Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2011

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 10 Tahun 2011

TANGGAL : 28 Juni 2011

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT

NO	INSTANSI	KODE
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	11001
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11002
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	11003
4	Kementerian Sekretariat Negara	12001
5	Kementerian Riset dan Teknologi	12002
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	12003
7	Kementerian Lingkungan Hidup	12004
8	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	12005
9	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12006
10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	12007
11	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	12008
12	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	12009
13	Kementerian Perumahan Rakyat	12010
14	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	12011
15	Kementerian Dalam Negeri	13001
16	Kementerian Luar Negeri	13002
17	Kementerian Pertahanan	13003
18	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13004
19	Kementerian Keuangan	13005
20	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	13006
21	Kementerian Perindustrian	13007
22	Kementerian Perdagangan	13008
23	Kementerian Pertanian	13009
24	Kementerian Kehutanan	13010
25	Kementerian Perhubungan	13011
26	Kementerian Kelautan dan Perikanan	13012
27	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13013
28	Kementerian Pekerjaan Umum	13014
29	Kementerian Kesehatan	13015
30	Kementerian Pendidikan Nasional	13016

NO	INSTANSI	KODE
31	Kementerian Sosial	13017
32	Kementerian Agama	13018
33	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	13019
34	Kementerian Komunikasi dan Informatika	13020
35	Majelis Permusyawaratan Rakyat	14001
36	Dewan Perwakilan Rakyat	14002
37	Dewan Perwakilan Daerah	14003
38	Mahkamah Agung	14004
39	Badan Pemeriksa Keuangan	14005
40	Mahkamah Konstitusi	14006
41	Komisi Yudisial	14007
42	Ombudsman Republik Indonesia	14008
43	Arsip Nasional Republik Indonesia	15001
44	Badan Kepegawaian Negara	15002
45	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	15003
46	Badan Pusat Statistik	15004
47	Badan Standardisasi Nasional	15005
48	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15006
49	Badan Tenaga Nuklir Nasional	15007
50	Badan Intelijen Negara	15008
51	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	15009
52	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	15010
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	15011
54	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	15012
55	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15013
56	Badan Pertanahan Nasional	15014
57	Badan Pengawas Obat dan Makanan	15015
58	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	15016
59	Badan Narkotika Nasional	15017
60	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	15018
61	Badan SAR Nasional	15019
62	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	15020
63	Badan Koordinasi Keamanan Laut	15021
64	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	15022
65	Lembaga Administrasi Negara	15101

NO	INSTANSI	KODE
66	Lembaga Sandi Negara	15102
67	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	15103
68	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	15104
69	Lembaga Ketahanan Nasional	15105
70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15106
71	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	15201
72	Kejaksaan Agung	16001
73	Kepolisian Negara Republik Indonesia	16002
74	Dewan Ketahanan Nasional	16003
75	Komisi Pemilihan Umum	16004
76	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	16005



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


EDY TOPO ASHARI